

# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jln. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33, Telp : (0451) 421651-421830  
Palu – Sulawesi Tengah  
Kode Pos 94117



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si  
NIP : 19660816 198603 1 009  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. RUSDY MASTURA  
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 19 Juni 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

  
H. RUSDY MASTURA

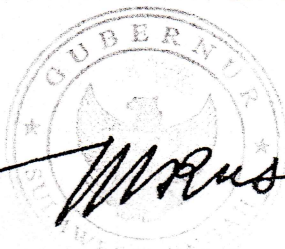
  
Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Indeks Reformasi Birokrasi	64
2	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	- Indeks Desa Membangun - Persentase Desa Mandiri - Persentase Desa Maju - Persentase Desa Berkembang - Persentase Desa Tertinggal - Persentase Desa Sangat Tertinggal	0,6820 Indeks 3,366 % 37,188 % 49,674 % 9,663 % 0,109 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.058.668.767	APBD
2	Program Penataan Desa	2.848.723.978	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	162.350.450	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.174.665.587	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.399.950.664	APBD

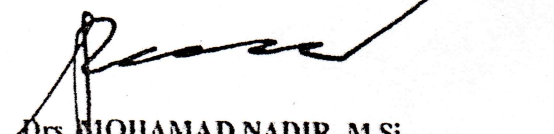
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



**II. RUSDY MASTURA**

Palu, 19 Juni 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**Dr. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
NIP. 19660816 198603 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si  
NIP : 19820527 200012 1 001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si  
NIP : 19660816 198603 1 009  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

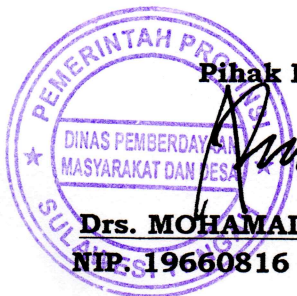
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**



**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

**Pihak Pertama,**

**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19820527 200012 1 001**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	- Nilai SAKIP - IKM - Persentase Realisasi Anggaran	75 80 97%
	<b>Terlaksannya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	10
	- Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	3 Laporan
	- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

#### Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi **Rp.13.058.668.767,-**
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 9.875.439.334,-
  - b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Rp. 85.999.900,-
  - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp. 1.189.010.207,-
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 204.085.125,-
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 686.534.451,-
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 243.507.600,-
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 394.519.200,-

h. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Rp. 379.572.950,-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 60.965.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Rp. 122.575.400,-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 196.032.550,-

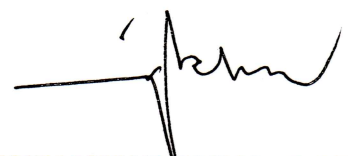
Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**

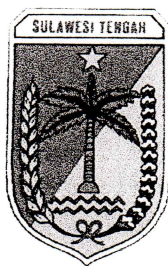



**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

**Pihak Pertama,**



**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19820527 200012 1 001**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si  
NIP : 19761005 200112 2 003  
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Asset Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si  
NIP : 19820527 200012 1 001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**



**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19820527 200012 1 001**

**Pihak Pertama,**

**INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si**  
**NIP. 19761005 200112 2 003**

No	Sasaran	Indikator	Target
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></li> <li>- Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>- Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Capaian Realisasi Anggaran</b></li> <li>- Jumlah Orang yang Menerima dan Tunjangan ASN</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>97 %</b></li> <li>72 Orang/Bulan</li> <li>1 Dokumen</li> <li>3 Laporan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b></li> <li>- Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jumlah Dokumen KeTatausahaan dan Kepegawaian</b></li> <li>- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 Dokumen</b></li> <li>1 Laporan</li> </ul>

### Kegiatan dan Sub Kegiatan

### Anggaran


<b>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 9.875.440.284,-</b>
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.8.505.160.384,-
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.1.290.280.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 79.999.900,-



2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah **Rp. 85.999.900,-**  
- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD **Rp. 85.999.900,-**

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**  
  
**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19820527 200012 1 001**

**Pihak Pertama,**  
  
**INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si**  
**NIP. 19761005 200112 2 003**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINGGO PANDIT WARDANI, SH , M.Si  
NIP : 19680828 200212 1 005  
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si  
NIP : 19820527 200012 1 001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**

  
**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19820527 200012 1 001**

**Pihak Pertama,**

  
**LINGGO PANDIT WARDANI, SH , M.Si**  
**NIP. 19680828 200212 1 005**

No	Sasaran	Indikator	Target
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b></li> <li>- Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>- Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( Customer/Stakholder)</b></li> <li>- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>- Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan</li> <li>- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	<p><b>80 Indeks</b></p> <p>5 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p> <p>160 Orang 2 Kali</p> <p>95 Orang 4 Kali</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></li> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>- Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</b></li> <li>- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan</li> <li>- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</li> <li>- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan</li> <li>- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	<p><b>1 Dokumen</b></p> <p>1 Paket</p> <p>2 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>4 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>3 Laporan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></li> <li>- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></li> <li>- Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat</li> <li>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik yang di Sediakan</li> </ul>	<p><b>1 Laporan</b></p> <p>4 Laporan</p> <p>12 Laporan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></li> <li>- Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</b></li> <li>- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya</li> <li>- Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara</li> <li>- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi</li> </ul>	<p><b>1 Dokumen</b></p> <p>31 Unit</p> <p>44 Unit</p> <p>1 Unit</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></li> <li>- Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</li> <li>- Terlaksananya Pengadaan Mebel</li> <li>- Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></li> <li>- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</li> </ul>	<p><b>1 Dokumen</b></p> <p>2 Unit</p> <p>32 Set</p> <p>2 Paket</p>

**Kegiatan dan Sub Kegiatan****Anggaran**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b><u>Rp. 204.085.125,-</u></b>   |
| - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai  | Rp. 55.000.000,-                  |
| - Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Rp. 26.590.575,-                  |
| - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | Rp. 52.334.700,-                  |
| - Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Rp. 70.159.850,-                  |
| <b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b><u>Rp. 686.534.451,-</u></b>   |
| - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Rp. 25.009.050,-                  |
| - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Rp. 73.124.650,-                  |
| - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Rp. 24.499.626,-                  |
| - Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Rp. 50.000.000,-                  |
| - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp. 25.000.225,-                  |
| - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp. 489.100.900,-                 |
| <b>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b><u>Rp. 243.507.600,-</u></b>   |
| - Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Rp. 5.000.000,-                   |
| - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik   | Rp. 238.507.600,-                 |
| <b>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b><u>Rp. 394.519.200,-</u></b>   |
| - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 159.719.200,-                 |
| - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rp. 194.800.200,-                 |
| - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Rp. 40.000.000,-                  |
| <b>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b><u>Rp. 1.189.010.207,-</u></b> |
| - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan  | Rp. 287.150.000,-                 |
| - Pengadaan Mebel  | Rp. 112.690.536,-                 |
| - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp. 789.169.671,-                 |

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua****MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19820527 200012 1 001****Pihak Pertama,****LINGGO PANDIT WARDANI, SH, M.Si**  
**NIP. 19680828 200212 1 005**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si  
NIP : 19860519 200412 1 003  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penataan Desa dan Perkembangan Desa  
Dinas PMD Prov. Sulteng

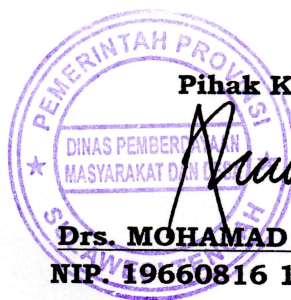
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si  
NIP : 19660816 198603 1 009  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**Pihak Kedua**

**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Pertama,**

**ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19860519 200412 1 003**

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dalam Penataan Desa Sesuai Standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kelembagaan Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa Sesuai standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.257%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa</li> <li>- Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Laporan</li> <li>3 Dokumen</li> <li>2 Dokumen</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya Peningkatan Pemerintahan Desa yang di Kelola Secara Efektif dan Efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang Dikelola Secara Efektif dan Efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.858%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa</li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan</li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Laporan</li> <li>3 Dokumen</li> <li>5 Dokumen</li> <li>14 Dokumen</li> </ul>

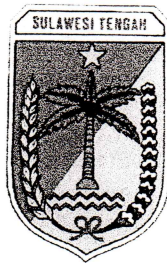
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan****Anggaran**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Program Penataan Desa   | <b>Rp. 90.650.200,-</b> |
| a. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Rp. 90.650.200,-        |
| - Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa  | Rp.50.000.200,-         |
| - Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat  | Rp.40.650.000,-         |
| 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa  | <b>Rp.572.000.600,-</b> |
| a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | Rp. 572.000.600,-       |
| - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa  | Rp. 50.000.200,-        |
| - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan   | Rp. 70.000.400,-        |
| - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan                                       | Rp. 452.000.000,-       |

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua****Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009****Pihak Pertama,****ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19860519 200412 1 003**





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si  
NIP : 19860519 200412 1 003  
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si  
NIP : 19660816 198603 1 009  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**

  
**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

**Pihak Pertama,**

  
**ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19860519 200412 1 003**

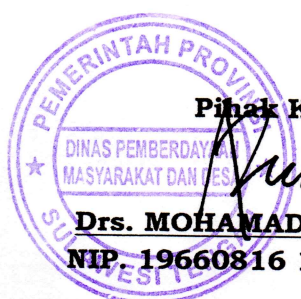
No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tercapainya Peningkatan Pemerintahan Desa yang di Kelola Secara Efektif dan Efisien</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang Dikelola Secara Efektif dan Efisien</b></li> </ul>	<p><b>10.858%</b></p>
a	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b></li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</li> <li>- Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa</li> <li>- Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b></li> <li>- Jumlah Dokumen Produk Hukum Desa yang Di Tetapkan</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa</li> <li>- Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang di Bina</li> </ul>	<p><b>1 Laporan</b></p> <p>3 Dokumen</p> <p>5 Dokumen</p> <p>56 Orang</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tercapainya Peningkatan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa dan Kaswasan</b></li> </ul>	<p><b>0.380%</b></p>
b	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b></li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten /Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan</b></li> <li>- Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupate/Kota</li> </ul>	<p><b>1 Laporan</b></p> <p>4 Dokumen</p>

3	- Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dalam Penataan Desa Sesuai Standar	- Persentase Kelembagaan Desa yang Terfasilitasi Dalam Penataan Desa Sesuai Standar	3,257%
	- Terlaksananya Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	- Jumlah Laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	1 Laporan
	- Terlaksananya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	- Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	39 Unit

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Program Penataan Desa   | <b>Rp.2.758.073.778,-</b>  |
| a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  | Rp. 572.466.750,-          |
| - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa  | Rp. 32.000.050,-           |
| - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa  | Rp. 232.000.300,-          |
| - Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa   | Rp. 308.466.400,-          |
| 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa  | Rp. 62.350.300,-           |
| a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi   | Rp. 62.350.300,-           |
| - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Lintas Kab/Kota   | Rp. 62.350.300,-           |
| 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa  | <b>Rp. 2.758.073.778,-</b> |
| a. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Rp. 2.758.073.778,-        |
| - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa  | Rp. 2.758.073.778,-        |



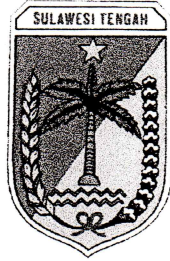
**Pihak Kedua**

**Drs. MOHAMMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Pertama,**

**ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19860519 200412 1 003**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si  
NIP : 19770820 200003 2 003  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si  
NIP : 19660816 198603 1 009  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**

  
**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

**Pihak Pertama,**

  
**REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si**  
**NIP. 19770820 200003 2 003**

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	- Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat di Desa	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas yang diberdayakan	1,810%
	- Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten Kota	- Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas daerah Kegiatan	1 Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Terlaksananya Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</li> <li>- Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</li> </ul>	<p>1 Laporan</p> <p>3 Dokumen</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penanggulangan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>	<p>9 Laporan</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>	<p>5 Dokumen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>	<p>56 Unit</p>

<p>- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat</p>	<p>- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan Kapasitas Kelembagaannya</p>	<p>125 Lembaga</p>
---	--	--------------------

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

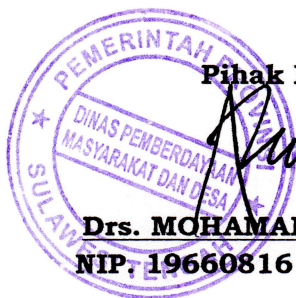
**Anggaran**

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat **Rp. 5.143.020.211,-**
  - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten Kota **Rp. 5.143.020.211,-**
    - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat **Rp. 50.000.000,-**
    - Fasiltasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa **Rp. 50.000.060,-**
    - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penanggulangan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga **Rp. 1.286.629.562,-**
    - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat **Rp. 99.999.800,-**

- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Rp. 3.531.390.789,-  
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,  
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/  
Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Pengembangan Lembaga Rp. 125.000.000,-  
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,  
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat  
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**

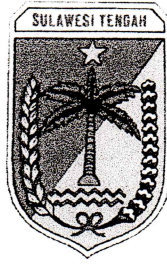


**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

**Pihak Pertama,**

**REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si**  
**NIP. 19770820 200003 2 003**





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si  
NIP : 19820527 200012 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si  
NIP : 19660816 198603 1 009  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**

  
**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

**Pihak Pertama,**

  
**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19820527 200012 1 001**

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	- Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat di Desa	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas yang diberdayakan	1,810%
a	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten Kota</li> <li>- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas daerah Kegiatan</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</li> <li>- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Laporan</li> <li>1 Dokumen</li> <li>1 Dokumen</li> </ul>


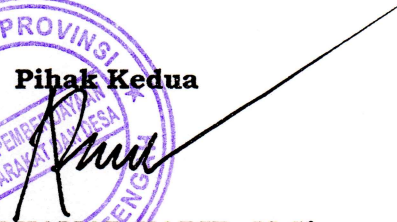
2	- <b>Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dalam Penataan Desa Sesuai Standar</b>	- <b>Presentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang Dikelola Secara Efektif dan Efisien</b>	<b>10.858%</b>
a	- <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan dan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	- <b>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>  - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	<b>1 Laporan</b>  3 Dokumen
3	- <b>Tercapainya Peningkatan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan</b>	- <b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan</b>	<b>0,380%</b>
a	- <b>Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan</b>	- <b>Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan</b>	<b>1 Laporan</b>
	- Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan****Anggaran**

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat **Rp. 256.930.453,-**
  - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten Kota **Rp. 256.930.453,-**
    - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa **Rp. 166.100.253,-**
    - Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna **Rp. 90.830.200,-**
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa **Rp.1.030.198.237,-**
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa **Rp.1.030.198.237,-**
    - Pembinaan dan Pengawasan Penetapan dan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa **Rp.1.030.198.237,-**
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa **Rp. 100.000.150,-**
  - a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi **Rp. 100.000.150,-**
    - Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan **Rp. 100.000.150,-**

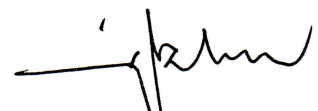
Palu, 19 Juni 2023

**Pihak Kedua**



**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si**  
**NIP. 19660816 198603 1 009**

**Pihak Pertama,**



**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19820527 200012 1 001**